

Analisis *Value For Money* Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang

Maria Selina Dhoe ^{1*}, R. Setyo Budi Suharto ², Yunelci M. Seliamang³

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Kupang

*Email: maria.dhoe@gmail.com

Abstract

The increasing of public awareness toward the implementation of the public administration, the performance of government agencies now is become the spotlight. The public sector organizations were often seen as a den of inefficiency, dissipation, sources of leakage of funds and the institutions that are always suffer losses. An increasingly intelligent and critical society demands that public sector institutions and transparency be carried out in order to create good governance. In fact, the budget and realization of the Badan Keuangan Daerah Kota Kupang still does not appropriate yet with the targets achieved. The purpose of this study was to determine the financial performance of the Badan Keuangan Daerah Kota Kupang through value for money analysis. The data collection method used is documentation, with the object of research being the target report and the realization of the budget of the Badan Keuangan Daerah Kota Kupang in the period of 2016-2018. The data analysis technique used is quantitative analysis on economic, efficiency and effectiveness measurements. The results of the research on the financial performance of the Badan Keuangan Daerah Kota Kupang from the economic element of the Badan Keuangan Daerah Kota Kupang was categorized as quite economical because it was in the ratio between 85%-100%. From the efficiency element, the Badan Keuangan Daerah Kota Kupang in 2016 was in the inefficient category because the efficiency ratio showed more than 100%. Whereas in 2017 and 2018 were categorized as efficient because the results of the efficiency ratio showed between 90%-99%. From the effectiveness element of financial performance in 2016-2018, was categorized as quite effective because the level of effectiveness ratio was between 85%-99%.

Keywords: economy, efficiency and effectiveness.

PENDAHULUAN

Dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik, kinerja instansi pemerintah kini menjadi sorotan. Organisasi sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Menuntut dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik menunjukkan bahwa masyarakat semakin cerdas dan kritis dalam menilai kinerja organisasi sektor publik. Tuntutan masyarakat ini sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang digunakan sebagai dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam menciptakan *good governance*, yaitu

pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan salah satu pilar dalam perencanaan pembangunan bagi Pemerintah Daerah. Dari perencanaan pembangunan ini pemerintah daerah berupaya melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya perencanaan APBD. Suatu sistem pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah yang terkait dengan pengelolaan APBD perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif dan efisien serta akuntabel. Untuk itu diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Pengukuran kinerja yang digunakan

oleh organisasi sektor publik, salah satunya adalah dengan menggunakan metode *value for money*.

Konsep *value for money* merupakan penghargaan terhadap nilai uang, hal ini yang berarti setiap rupiah uang harus dihargai secara layak dan digunakan sebaik-baiknya (Mahmudi, 2016). *Value For Money* menurut Mardiasmo (2009:4) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Salah satu hal yang dapat dijadikan alat untuk menilai pertanggungjawaban suatu instansi Pemerintah adalah dengan melihat kinerja keuangan daerahnya melalui perhitungan dan analisis terhadap pencapaian target dan realisasi dari penerimaan dan pengeluaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-nya (APBD), baik dari sisi *input*, *output*, *impact*, dan *benefit*-nya. Berikut ini merupakan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Kupang Tahun 2016-2018 adalah:

Tabel 1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja BKD Kota Kupang Tahun 2016-2018

Tahun	Pendapatan		Belanja	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2016	1.190.074.517.368,00	1.141.379.963.658,93	1.314.701.108.744,40	1.165.593.633.042,00
2017	1.204.715.632.412,30	1.156.105.794.118,85	1.286.026.181.285,63	1.147.721.807.663,43
2018	1.193.807.700.620,38	1.169.535.197.600,75	1.269.507.759.068,13	1.167.614.842.066,80

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Kupang Tahun 2019

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Dalam sistem manajemen strategi, pengukuran kinerja berfungsi sebagai alat penilai apakah strategi yang sudah ditetapkan telah berhasil dicapai. Dari hasil pengukuran kinerja dilakukan *feedback* sehingga tercipta sistem pengukuran kinerja yang mampu memperbaiki kinerja organisasi secara berkelanjutan. Berdasarkan *feedback* (umpan balik) hasil pengukuran kinerja bisa memperbaiki kinerja pada periode berikutnya baik dalam perencanaan maupun dalam implementasi (Mahsun, 2009:145).

Sebagai salah satu lembaga pengelolaan keuangan daerah, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang bertugas meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

Berdasarkan tabel 1 diatas, bahwa pendapatan dan belanja daerah dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, hal ini dilihat pada sisi pendapatan tahun 2016-2018 yaitu bahwa kinerja anggaran dan realisasi pendapatan mengalami peningkatan 0,06% dari tahun 2016-2017 dan tahun 2017-2018 mengalami peningkatan pendapatan 2%. Sedangkan pada sisi kinerja anggaran dan realisasi belanja tahun 2016-2018 yaitu bahwa mengalami peningkatan belanja 0,59% dari tahun 2016-2017 dan mengalami peningkatan belanja 2,73% dari tahun 2017-2018. Namun ditinjau setiap tahunnya target realisasi sisi pendapatan masih dibawah 100% yaitu minus 4,09% tahun 2016, minus 4,03% tahun 2017 dan perbaikan yang signifikan terjadi tahun 2018 menjadi minus 2,03%. Dari sisi target realisasi belanja yaitu penghematan belanja dibawah yang ditarget 11,34% pada tahun 2016, 10,75% pada tahun 2017 dan 8,03% pada tahun 2018.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja keuangan dengan menggunakan metode *Value For Money* pada Badan Keuangan Daerah. Maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah kinerja keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kota

Kupang tahun 2016-2018 dengan menggunakan metode Value For Money.

METODE

Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yaitu pengumpulan dan pengukuran data yang berbentuk angka (Sugiyono, 2005) dengan menerapkan konsep pengukuran value for money dalam pengukuran kinerja keuangan Badan Keuangan Daerah Kota Kupang, kemudian dengan menganalisis unsur-unsur value for money.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Primer dan Data Sekunder adalah sebagai berikut:

1. Data Primer data yang diperoleh dari responden melalui wawancara peneliti dengan narasumber terkait dengan kinerja keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang.
2. Data Sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah, berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori dan lain sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang dikeluarkan oleh objek penelitian yaitu Badan Keuangan Daerah Kota Kupang.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Pengukuran Ekonomi

Mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik. Pengukuran ekonomi dapat diukur dengan membandingkan antara anggaran pengeluaran dan realisasinya. Berikut formula untuk mengukur tingkat ekonomi:

$$Ekonomi = \frac{\text{Input Rencana (Anggaran)}}{\text{Input Realisasi (Capaian)}} \times 100\%$$

2. Pengukuran Efisiensi

Mengukur tingkat *input* dari organisasi sektor publik terhadap *output* sektor publik. Pengukuran tingkat efisiensi memerlukan data-data biaya untuk memperoleh pendapatan dan data realisasi pendapatan.

Berikut ini formula untuk mengukur tingkat efisiensi:

$$Efisiensi = \frac{\text{Nilai Kinerja Output}}{\text{Nilai Kinerja Input}} \times 100\%$$

3. Pengukuran Efektivitas

Mengukur tingkat *output* dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik. Pengukuran tingkat efektivitas memerlukan data-data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan. Berikut formula untuk mengukur tingkat efektivitas:

$$Efektivitas = \times 10 \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran tingkat ekonomis yaitu Tingkat biaya yang dikeluarkan sektor publik untuk melakukan suatu pelayanan publik. Tingkat ekonomis dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan target anggaran dan presentase tingkat pencapaiannya. Apabila hasil lebih dari 100% maka dapat dikatakan bahwa anggaran ekonomis. Apabila hasil antara 85%-100% maka anggaran cukup ekonomis. Jika hasil antara 65%-84% maka anggaran dikatakan kurang ekonomis dan apabila hasil dibawah 60% anggaran dikatakan tidak ekonomis. Perhitungan tingkat ekonomis berdasarkan data dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Kupang tahun anggaran 2016-2018.

Tabel 2. Hasil Perhitungan Rasio Ekonomis

Tahun	Rasio Ekonomis	Kriteria
2016	88,65 %	Cukup Ekonomis
2017	89,24 %	Cukup Ekonomis
2018	91,97 %	Cukup Ekonomis

Berdasarkan tabel 2 perhitungan kinerja menggunakan tingkat ekonomis menunjukkan bahwa penganggaran pada Badan Keuangan

Daerah Kota Kupang dikatakan cukup ekonomis karena dari tahun 2016 sampai dengan 2018 tingkat ekonomis berkisar diantara 85% - 100%. Semakin besar persentase ekonomis maka kinerja keuangan Badan Keuangan Daerah Kota Kupang semakin baik. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang telah mengelola anggaran dengan cara yang cukup ekonomis. Ekonomis terkait dengan sejauh mana dapat meminimalisir *input* primer yang berupa anggaran atau kas menjadi *input* sekunder berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur dan barang modal yang dikonsumsi untuk pelaksanaan kegiatan operasi organisasi, dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

Pengukuran tingkat efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output* atau *input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Apabila hasil lebih dari 100% maka dapat dikatakan bahwa anggaran tidak efisien. Apabila hasil 100% maka anggaran cukup efisien. Jika hasil antara 90%-99% maka anggaran dikatakan efisien, dan apabila hasil dibawah 90% anggaran dikatakan sangat efisien. Perhitungan tingkat efisiensi berdasarkan data dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang pada Badan Keuangan Kota Kupang tahun anggaran 2016-2018.

Tabel 3. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi

Tahun	Rasio Efisiensi	Kriteria
2016	102,12 %	Tidak Efisien
2017	99,27 %	Efisien
2018	99,83 %	Efisien

Berdasarkan tabel 3 perhitungan kinerja menggunakan tingkat efisiensi menunjukkan bahwa pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang menyelenggarakan program dengan tingkat efisiensi yang tergolong efisien dan tidak efisien. Penyebab terjadinya ketidak efisienan anggaran tersebut dikarenakan terjadinya pemborosan-pemborosan pada sektor tertentu, seperti sudah tersedianya fasilitas yang sudah memadai tetapi masih ada anggaran untuk renovasi dan pengembangan, ini dapat dilihat dari besarnya anggaran belanja barang yang setiap tahun terus mengalami kenaikan,

kemudian penyebab ketidak efisienan anggaran yaitu besarnya pengeluaran belanja yang didominasi belanja pegawai, seperti perjalanan dinas/kegiatan rapat di luar kantor dan pengadaan kendaraan dinas baru di instansi pemerintahan. Besarnya realisasi anggaran belanja dari realisasi anggaran pendapatan yang diterima mengindikasikan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan masih sangat kurang dan terkesan adanya pemborosan dengan tidak mengindahkan azas penghematan dan efisiensi anggaran belanja daerah. Keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan target anggaran belanja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target anggaran belanja lebih besar dari realisasi anggaran pendapatan yang diterima.

Pengukuran tingkat efektivitas dinilai efektif apabila suatu organisasi, program atau kegiatan yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Apabila hasil lebih dari 100% maka dapat dikatakan bahwa anggaran efektif. Apabila hasil antara 85%-99% maka anggaran cukup efektif. Jika hasil antara 65%-84% maka anggaran dikatakan kurang efektif dan apabila hasil dibawah 65% anggaran dikatakan tidak efektif. Perhitungan tingkat efektivitas berdasarkan data dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang tahun anggaran 2016-2018

Tabel 4. Hasil Perhitungan Rasio Efektifitas

Tahun	Rasio Efektifitas	Kriteria
2016	95,90 %	Cukup Efektif
2017	95,96 %	Cukup Efektif
2018	97,96 %	Cukup Efektif

Berdasarkan tabel 4 perhitungan kinerja menggunakan tingkat efektivitas menunjukkan bahwa penganggaran pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dikategorikan cukup efektif karena realisasi anggaran yang cukup mendekati target anggaran yang telah

ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa hasil program dengan target yang ditetapkan hampir tercapai. Ini dapat dilihat dari terlaksanakannya program yang ditargetkan pemerintah yaitu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, agama, seni budaya, olahraga dan pemuda, peningkatan kualitas dan kuantitas penataan ruang, peningkatan kualitas lingkungan perkotaan, penataan kawasan tepian sungai, pembangunan sarana dan prasarana transportasi serta manajemen transportasi, Peningkatan dan pengembangan pelayanan air bersih, pengembangan sektor industri, perdagangan dan jasa, koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta pariwisata.

Akuntansi sektor publik dapat berperan untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas atau yang dikenal dengan *Value For Money*. *Value For Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang menekankan pentingnya penghargaan atas setiap rupiah uang publik dengan cara memanfaatkannya secara ekonomis, efisien dan efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi program yang diukur dari tingkat ekonomis selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berada pada kriteria cukup ekonomis. Kriteria cukup ekonomis menunjukkan kinerja yang cukup baik pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang. Konsep ekonomis terkait dengan penghematan anggaran untuk memperoleh *input* dan tidak melakukan pemborosan anggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan dan operasional organisasi.

Hasil pengukuran kinerja yang diukur dari tingkat efisiensi menunjukkan bahwa efisien dan tidak efisien anggaran. Ini ditunjukkan dari hasil perhitungan tingkat efisiensi anggaran berkisar diantara 90%-99% dan ada yang lebih dari 100%. Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input*. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* yang serendah-rendahnya.

Pengukuran kinerja yang diukur berdasarkan tingkat efektivitas pada tahun 2016-2018 cukup efektif dikarenakan hasil perhitungan berkisar diantara 85%-99%. Hasil tersebut menunjukkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan sudah berjalan cukup baik.

Pengukuran kinerja dengan menggunakan *Value For Money* didasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas yang dilakukan pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang menunjukkan bahwa realisasi program yang diukur dari tingkat ekonomis selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berada pada kriteria cukup ekonomis. Pengukuran kinerja yang diukur dari tingkat efisiensi menunjukkan bahwa efisien dan tidak efisien anggaran. Ini ditunjukkan dari hasil perhitungan tingkat efisiensi anggaran berkisar diantara 90%-99% dan ada yang lebih dari 100%. Pada tingkat efektivitas telah memenuhi kriteria cukup efektif karena realisasi anggaran cukup mendekati target anggaran yang telah ditetapkan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat ekonomis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang dikategorikan cukup ekonomis karena berada pada rasio antara 85%-100%. Ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan anggaran pemerintah sudah seminimal mungkin dalam merealisasikan anggaran untuk program/kegiatan yang ingin dicapai.
2. Tingkat efisiensi untuk realisasi anggaran tahun 2016 dikategorikan tidak efisien dikarenakan hasil rasio efisiensi menunjukkan lebih dari 100%. Pada tahun tersebut BKD Kota Kupang mengalami defisit anggaran yang disebabkan oleh realisasi belanja tahun 2016 meningkat signifikan. Sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 berada pada kategori efisien dikarenakan hasil rasio efisiensi menunjukkan antara 90-99%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran belanja belum memenuhi syarat efisien yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil maksimum.
3. cukup sesuai dengan yang diharapkan Tingkat efektivitas kinerja keuangan pada tahun 2016-2018 dikategorikan cukup efektif karena tingkat rasio efektivitasnya berada diantara 85%-99%. Ini menunjukkan bahwa program atau kegiatan yang diprogramkan sudah terealisasi dan.

Disarankan untuk Badan Keuangan Daerah Kota Kupang antara lain:

1. Dilihat dari tingkat ekonomis, Badan Keuangan Daerah Kota Kupang diharapkan lebih mampu melakukan penghematan anggaran dengan menghindari pengeluaran yang tidak produktif atau mengurangi biaya yang tidak diperlukan dalam mencapai program/kegiatan yang ingin dicapai.
2. Dilihat dari tingkat efisiensi, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang harus lebih memperhatikan perencanaan dan pengendalian realisasi anggaran belanja dibandingkan realisasi anggaran pendapatan, karena pada tahun 2016 rasio efisiensinya dikategorikan tidak efisien.
3. Dilihat dari tingkat efektivitas, Badan Keuangan Daerah Kota Kupang untuk tahun-tahun selanjutnya harus dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. BPFE Yogyakarta: Yogyakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016, Buku I Ringkasan Eksekutif*, Jakarta September 2016
- Bratakusuma, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta
- Mahsun. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE Yogyakarta: Yogyakarta.
- Mahsun M, Firma dan Heribertus. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE Yogyakarta:
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Muindro, Renyowijoyo. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Penerbit Mitra Wacana Media: Jakarta.
- Pedoman Akademik Politeknik Negeri Kupang. 2013-2014. Politeknik Negeri Kupang: Kupang.
-Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
-Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
-Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 105 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
-Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125
- Riduwan. (2012). *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2018. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Skripsi
- Kurnia, Sri. 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palembang*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.

Jurnal

- Ardila, Isna dan dan Ayu Anindya Putri. 2015. *Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Liando H Saputra, David dan Inggriani. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode Value For Money*. Jurnal Akuntansi Universitas Samratulangi, Manado.